

ABSTRAK

Fadhil Rafiq Iskandar Putra, 1208010063 Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Terdapat penyandang disabilitas pada tahun 2021 sebanyak 700 orang, pada tahun 2022 sebanyak 3.481 orang, dan 2023 sebanyak 151 orang. Hal tersebut menjadi sorotan bagi Dinas Sosial Kabupaten Bandung untuk berfokus kepada penanganan kepada PMKS khususnya penyandang disabilitas. Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 15 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Maka Dinas Sosial Kabupaten Bandung membuat program yaitu program pembinaan penyandang disabilitas. Tetapi, program tersebut masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik sehingga menjadi dasar bagi penulis untuk meneliti program pembinaan anak terlantar ini.

Penelitian ini menjadi menarik karena jika dibandingkan dengan penelitian yang lain, penelitian ini tidak hanya berfokus dengan jawaban apakah program ini terimplementasi atau tidak. Tetapi, penelitian ini membahas secara mendalam dan spesifik terkait apa saja hal yang mendorong program ini agar terimplementasi ataupun tidak terimplementasi dengan tepat sesuai dengan empat dimensi yang dikemukakan oleh Riant Nugroho yaitu: tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan. Maka dari itu, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Setelah melakukan penelitian didapat hasil bahwa program tersebut sebagian besar sudah terimplementasi dengan baik, namun dalam empat dimensi yang ada dalam tepat pelaksanaan masih belum optimal. Dalam tepat pelaksanaan peneliti masih menemukan beberapa permasalahan, hal ini terlihat dari fasilitas ramah penyandang disabilitas yang susah diakses. Dalam UU No.8 Tahun 2016 pasal 97 tentang penyandang disabilitas sangat spesifik menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, yang mudah diakses penyandang disabilitas meliputi jalan, bangunan gedung, pemukiman, pertamanan, dan pemakaman, namun pada kenyataannya masih kurang dan banyak yang rusak atau tidak layak pakai.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial

ABSTRACT

Fadhil Rafiq Iskandar Putra, 1208010063 Implementation of the Policy for the Development Program for Persons with Disabilities at the Bandung Regency Social Service.

There will be 700 people with disabilities in 2021, 3,481 people in 2022, and 151 people in 2023. This has become a highlight for the Bandung Regency Social Service to focus on handling PMKS, especially people with disabilities. In accordance with Bandung Regency Regional Regulation No. 15 of 2013 concerning the implementation of social welfare in an integrated, targeted and sustainable manner. So the Bandung Regency Social Service created a program, namely a development program for people with disabilities by the Bandung Regency Social Service. However, in general, this program has not been implemented well, so it has become the basis for the author to research this neglected children development program.

This research is interesting because when compared to other research, this research does not only focus on the answer to whether this program is implemented or not. However, this research discusses in depth and specifically what things encourage this program to be implemented or not implemented correctly in accordance with the four dimensions proposed by Riant Nugroho, namely: right policy, right implementation, right target, right environment. Therefore, to answer the problems in this research, the author used a qualitative research method with a descriptive approach.

After conducting research, the results showed that the program had mostly been implemented well, but in the four dimensions, the implementation was still not optimal. In the implementation, the researchers still found several problems, this could be seen from the disability-friendly facilities which were difficult to access. In Law No. 8 of 2016 article 97 concerning people with disabilities very specifically states that the government and regional governments are obliged to guarantee infrastructure that is easily accessible to people with disabilities, which is easily accessible to people with disabilities, including roads, buildings, settlements, parks and cemeteries, but in reality it is still lacking and many are damaged or unfit for use.

Keywords: Policy Implementation, Persons with Disabilities, Social Services